

ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

NI MADE TISNAWATI

ABSTRACT

As one of fiscal policy, government expenditure is important factor to increasing the economic development in Province of Bali. In five years, the government expenditure is focused on routine expenditure, which not directly give impact to the public. The Province Bali is still depend to central government and loan. To build a good governance, the public participation is a need. The using of e-government especially among young generation is a strategic way.

Key words : *government expenditure, public participation*

Kemandirian Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah. Berdasarkan UU No 5 tahun 1974, pembiayaan pemerintah dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan rutin dan pembiayaan pembangunan. Semua pembiayaan tersebut dibiayai dari APBD yang bersumber dari PAD, APBN, bantuan luar negeri. Berdasarkan UU No 32 dan UU No 33 tahun 2004, pengeluaran rutin dan pembangunan diubah menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Sedangkan belanja Tidak Langsung (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota dan pemerintahan desa), belanja tidak terduga. Perbedaan terpenting konsep penganggaran UU No. 5 tahun 1974 dan UU No. 32 dan 33 tahun 2004, adalah lebih ditekankannya kemandirian daerah dalam UU terbaru. Kemandirian daerah ditunjukkan dengan kontribusi PAD terhadap APBD.

Berdasarkan hasil penelitian (1999), pada RAPBN 1999/2000 tercatat hanya lima daerah yang pendapatan asli daerah (PAD)nya memiliki proporsi terhadap penerimaan daerah di atas 50%. Provinsi Jawa Timur yang mengandalkan sektor industri, memiliki kemampuan terbesar dalam memenuhi kebutuhan daerahnya, yang tercermin dari 62,80% APBDnya diperoleh dari PAD. Disusul DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali dan Jawa Tengah.

Empat daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) terbesar yaitu Daerah Istimewa Aceh (kini, Nanggroe Aceh Darussalam), Riau, Kalimantan Timur dan Irian Jaya (sebelum terbagi menjadi 2 provinsi), justru memiliki kemampuan yang paling rendah untuk menggali potensi daerahnya. Peranan PAD terhadap APBD di keempat daerah tersebut masing-masing hanya 31,66%, 29,62%, 28,42% dan 14,96%. Kondisi ironis inilah yang membuktikan selama ini pelaksanaan otonomi daerah sangat menimbulkan ketergantungan daerah kepada pusat. Rendahnya peranan PAD dalam APBD di daerah-daerah tersebut juga menunjukkan rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran pembangunan.

Provinsi Bali yang kontribusi sektor tersiernya tinggi, masih mengalokasikan penerimaan asli daerahnya sebagian besar untuk belanja langsung. Tabel 1 menunjukkan selama lima tahun terakhir, penggunaan PAD untuk belanja langsung berjumlah di atas 50%.

Tabel 1. Alokasi PAD di Provinsi Bali (%)

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
2003	27,25	72,75
2004	27,42	72,58
2005	28,64	71,36
2006	34,35	65,65
2007	37,35	62,65

Sumber : Bappeda (2007 : 1-34)

Tabel 1 secara langsung menunjukkan masih tergantungnya daerah pada sumber bantuan pemerintah pusat dan luar negeri. Sumber-sumber penerimaan daerah lain memang masih memberikan peranan yang sangat penting. Bagaimanakah peranan pemerintah pusat dan bantuan luar negeri terhadap

penerimaan daerah di Provinsi Bali? Bagaimana cara meningkatkan transparansi anggaran publik di Provinsi Bali?

Transparansi Publik

Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya.

Transparansi anggaran didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat dalam hal fungsi dan struktur pemerintahan, tujuan kebijakan fiscal, sector keuangan public, dan proyeksi-proyeksinya. Hal ini berarti bahwa informasi mengenai aktivitas pemerintahan harus dapat diakses serta dapat dipercaya secara luas dan tepat waktu.

Beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut; mencegah korupsi, lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, menguatkan kohesi social karena kepercayaan public terhadap pemerintah akan terbentuk, menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha. (Andrianto, 2007 : 21)

UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan landasan kokoh bagi otonomi daerah. Pelimpahan otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah agar mampu melakukan pengambilan keputusan secara leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan prioritas dan kepentingan daerah sendiri..

Pentingnya monitoring atas APBD merupakan implikasi logis dari otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengelola keuangannya masing-masing untuk melakukan pembangunan di wilayahnya. Keleluasan keuangan ini di antaranya adalah desentralisasi fiscal melalui perimbangan pajak, bagi hasil sumber daya alam, DAU, serta DAK. Partisipasi

public harus didorong dalam era baru yang berbeda dengan era sebelumnya yang sentralistis. (Andrianto, 2007 : 28).

Dalam pelaksanaan *good dovernance* seharusnya melibatkan tiga pihak, yaitu public sector, civil society, dan *private sector*. Diperlukan keterbukaan informasi publik untuk memastikan semua pihak memiliki peran dalam pengambilan kebijakan. Untuk itu pemerintah minimal harus mempublikasikan beberapa hal berikut;

1. Informasi yang berkaitan dengan pembahasan kebijakan publik di DPRD
2. Dokumen perencanaan terakhir, termasuk RPJMD, RKPD, Renstra-SKPD, Renja-SKPD, kebijakan umum APBD, dan rencana tata ruang wilayah.
3. Draf dan versi akhir perda-perda
4. Dokumen APBD (rancangan dan versi terakhir) dan realisasinya (laporan keuangan pemerintah daerah/penjabaran APBD)
5. Laporan pemeriksaan (audit) oleh BPK-RI dan tindak lanjutnya
6. Laporan pertanggungjawaban bupati/walikota terakhir
7. Persyaratan, biaya, dan waktu yang dibutuhkan untuk perizinan dan pelayanan masyarakat, misalnya pengurusan KTP, SIM, akta kelahiran, dan sertifikat tanah
8. Informasi tentang kebijakan, prosedur, dan praktek pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu akses publik pada proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Diskusi rancangan dan versi akhir perda-perda di DPRD
2. Persiapan, perancangan, dan pembahasan akhir dokumen perencanaan, termasuk RPJMD, RKPD, Renstra-SKPD, Renja-SKPD, kebijakan umum APBD, dan rencana tata ruang wilayah
3. Pengalokasian anggaran (APBD)
4. Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.

Semua proses tersebut dapat dilakukan dengan bantuan internet sebagai pelaksanaan *good e- government*.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Per-ekonomian

Barata (2004: 39), kegiatan yang dilakukan

pemerintah yang mendorong besaran jumlah pengeluaran negara mempunyai pengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Ada beberapa sector perekonomian yang terpengaruh karena pengeluaran negara seperti antara lain sector produksi, distribusi, konsumsi masyarakat, dan keseimbangan perekonomian.

- a. Produksi; pengeluaran negara, secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi sector produksi. Pengeluaran pemerintah juga dapat dikatakan sebagai factor produksi lainnya yang berupa alam, modal, tenaga kerja dan manajemen (entrepreneur) karena pengeluaran pemerintah dapat menunjang tersedianya factor-faktor produksi tersebut. Misalnya saja, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan potensi sumberdaya manusia yang terdidik. Sumber daya manusia itu memperbesar factor produksi yang berupa tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan oleh sector produksi. Pengeluaran pemerintah untuk fasilitas bidang keuangan akan mendorong kemudahan akses terhadap modal untuk produksi. Pengeluaran pemerintah secara langsung untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa juga berpengaruh terhadap kontinuitas produksi para produsen. Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat GNP (Gross National Product) nyata dengan mengubah persediaan berbagai factor yang dapat dipakai dalam produksi, melalui program-program pengeluaran seperti pendidikan
- b. Distribusi; pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa. Ambil contoh, hasil dari pengeluaran anggaran untuk membiayai fasilitas pendidikan, paling tidak akan menambah ketrampilan sejumlah orang sehingga akan menjadi tenaga yang berprestasi relative baik dan berdaya beli baik. Demikian pula subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa akan mempermudah masyarakat yang berdaya beli rendah menjadi mudah untuk memperoleh barang dan jasa tertentu.
- c. Konsumsi; secara langsung atau tidak langsung pengeluaran negara dapat mengubah atau memperbaiki pola dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah maupun

mekanisme pasar. Misalnya penambahan penyediaan barang yang bersifat kolektif maupun barang-barang lain yang harganya disubsidi oleh pemerintah.

- d. Keseimbangan perekonomian; Dengan kebijakan fiskalnya pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasionalnya melalui target peningkatan PDB. Kebijakan fiskal itu dapat berupa pelaksanaan kebijakan surplus anggaran, deficit anggaran, kompensasi, investasi umum tergantung kepada situasi ekonomi yang dihadapi atau iklim ekonomi yang diinginkan.

Peranan Pemerintah Pusat, Daerah, Bantuan Luar Negeri dalam pembiayaan Pembangunan di Provinsi Bali

Sesuai dengan periodisasinya maka peranan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah Provinsi Bali selama ini adalah:

Periode tahun 1945 – 1950, sejak proklamasi kemerdekaan, seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, Bali mengalami pergolakan yaitu berlangsungnya revolusi fisik/gerilya di bawah DPRI Sunda kecil. Oleh sebab itu, bidang-bidang lainnya khususnya pembangunan tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Periode tahun 1950-1958, pada periode ini, Bali merupakan satu daerah pulau di bawah pemerintahan provinsi administrative sunda kecil/nusa tenggara, yang terbagi menjadi delapan swapraja yang dipimpin seorang kepala swapraja (raja). Pembangunan oleh pemerintah daerah Bali dan pemerintah swapraja pada masa ini, dituangkan dalam RAPBD Bali dan anggaran-anggaran swapraja, dimana masing-masing komponennya terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Pembangunan yang dilaksanakan pada periode ini digerakkan oleh masyarakat sendiri melalui gotong royong termasuk dilakukan juga oleh sector swasta nasional. Pembangunan sekolah poliklinik, jalan-jalan, irigasi dan bangunan umum lainnya sebagian besar dilakukan oleh swadaya masyarakat, sedangkan pemerintah bersifat membantu, mendorong dan mengarahkan saja.

Periode tahun 1958-1965, pada periode ini Provinsi Bali dibentuk berdasarkan undang-undang pembentukan Provinsi Bali nomor 64 tahun 1958.

Beberapa langkah kebijakan dalam pembangunan yang diambil antara lain :

- a Bidang Pembangunan Daerah dikoordinir oleh Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BAKOPDA) Provinsi Bali
- b dikoordinir oleh Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BAKOPDA) Provinsi Bali
- c Membantu pelaksanaan proyek-proyek nasional seperti ; Balitex, Hotel Bali Beach, Patal Tohpati, lapangan internasional Ngurah Rai.
- d Mengusahakan berdirinya satu universitas di Bali.

Periode tahun 1966-1968, setelah terjadi tragedi G 30 S PKI, pemerintah melakukan berbagai tindakan pemulihan keadaan dalam pemerintahab. Sebagai prasyarat sebelum dilaksanakannya Repelita I, maka dilaksanakan Tri program pemerintah daerah Provinsi Bali yang terdiri dari; pemulihan keamanan dan ketertiban umum dalam rangka mengatasi akibat penumpasan PKI dan menggerakkan usaha-usaha/aktivitas masyarakat kepada pembangunan daerah, konsolidasi pemerintah daerah dan rehabilitasi pembangunan melalui pengarahan masyarakat kepada pembangunan secara gotong royong.

Penyusunan proyek-proyek pembangunan daerah selama periode ini baik yang dilaksanakan lewat APBD Provinsi maupun yang diusulkan ke pusat dikoordinasikan BAKOPDA Bali (Universitas Udayana ikut didalamnya). Tahun 1969, BAKOPDA diambil alih Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali, sesuai keputusan menteri dalam negeri.

Pada tahun 1968, disusun Program Dasar Pemerintah Daerah Bali, yang bersifat lebih luas dan lebih lengkap dari pada Tri program pemerintah daerah Provinsi Bali sebelumnya, dan disahkan oleh DPRGR Provinsi Bali dengan SKP 30 Agustus 1968 Nomor 19/KPTS/DPRGR/1968. Dalam SKP tersebut dinyatakan bahwa program dasar itu (tahun 1969-1973) adalah petunjuk, pedoman dan pegangan seluruh aparat pemerintah daerah Provinsi Bali dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan tiap-tiap tahun melalui RAPBD Provinsi.

Pada periode Repelita I (tahun 1969/1970-1973/1974) ini pembangunan di Bali dilaksanakan melalui; proyek pelita nasional (sektoral-departemental), Inpres kabupaten, bantuan kepadatan penduduk, bantuan desa, bantuan khusus pres-

iden, RAPBD Provinsi, RAPBD kabupaten, sector swasta/masyarakat, PMDN, PMA, Inpres SD tahun 1973/1974. Pada periode ini pula Bali telah memiliki Regional plan Bali, rencana kota Denpasar, master plan pariwisata Bali dan Rencana kota kabupaten lainnya.

Selama periode 1974-1989 (pelita I-IV), peranan masyarakat semakin meningkat dalam pembangunan di Bali. Pemerintah hanya mempunyai kewajiban mendorong, membina dan mengarahkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha ke arah sasaran yang telah dituangkan sebagai garis-garis program pembangunan.

Pada pelita III contohnya, menurut rencana, dana pembangunan yang bersumber dari swasta/swadaya masyarakat diharapkan berperan 41% dari seluruh kebutuhan investasi, sisanya disediakan oleh pemerintah. Akan tetapi kenyataannya berbanding terbalik, swasta justru memberikan sumbangan yang lebih besar dibandingkan pemerintah yaitu 50,62% (Bappeda Tingkat I Bali, 1990 : 19).

Secara keseluruhan investasi yang terjadi selama kurun waktu dua pelita terus mengalami peningkatan terutama dalam pelita IV, realisasi jauh melampaui target yang direncanakan. Akan tetapi pemerintah tetap berperan penting sebagai pemandu pembangunan untuk mengarahkan/mengendalikan partisipasi masyarakat, swasta/dunia usaha dalam pembangunan. Secara relatif sumbangan pemerintah semakin mengecil, sebaliknya bila dilihat secara absolut, sumbangan sektor pemerintah dari tahun ke tahun rata-rata mengalami peningkatan dan melampaui target yang tertuang dalam Pelita IV.

Jika dilihat jumlah pembiayaan oleh pemerintah, menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana sektoral memberikan sumbangan paling dominan selama pelita ini adalah 66,43% (Bappeda Tingkat I Bali, 1990:20) selebihnya berasal dari sumber lainnya. Perkembangan dana APBN dalam empat tahun terakhir Pelita IV rata-rata mengalami penurunan cukup tajam, yang diakibatkan oleh adanya situasi perekonomian dunia yang tidak menentu dan mempengaruhi kemampuan pemerintah pusat dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan yang sedang dilaksanakan. Di lain pihak kenaikan jumlah alokasi dana bantuan luar negeri sebagai dana penunjang untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk membiayai pembangunan yang sangat mendesak terutama pada sector pertanian dan pengai-

ran, sector kesehatan dan sector sumber alam dan lingkungan hidup menjadi sangat penting.

Khusus mengenai bantuan luar negeri yang diterima Provinsi Bali, sejak pelita I telah dirasakan manfaat positifnya dan membantu pembiayaan pembangunan di Bali. Beberapa badan internasional seperti bank dunia, Bank Pembangunan Asia, United Nations Children's Fund (UNICEF), Cooperative For American Relief Everywhere Incorporation (CARE) Indonesia, Foster Parent Plan dan lain-lain. Semua organisasi tersebut memberikan bantuan sesuai dengan misi organisasinya, tidak hanya bantuan prasarana berupa fisik namun juga peningkatan kualitas SDM. Seperti Bank Dunia yang telah memberikan bantuan mengadakan penelitian/study dalam bidang kepariwisataan tahun 1970/1971. Hasil penelitian tersebut menghasilkan Rencana Induk Pariwisata Bali yang kemudian ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali tahun 1973.

Pelaksanaan program kegiatan dalam rangka bantuan Bank Dunia di Bali telah dimulai sejak tahun 1975 dan masih berjalan sampai saat ini. Bantuan tersebut antara lain; pelaksanaan program penyediaan prasarana di Nusa Dua sebagian besar telah selesai pada akhir tahun 1979, pembangunan ini telah dimulai pada pertengahan tahun 1976, bantuan tenaga ahli, pembuatan jalan raya (bypass) dan pemasangan alat telekomunikasi. Manfaat yang diperoleh Bali dalam menerima bantuan dari bank dunia adalah; tersedianya penyediaan fasilitas dalam rangka menunjang pariwisata di Bali, adanya penambahan kesempatan kerja, meningkatkan dan mendorong perkembangan daerah-daerah yang perkembangannya lambat, memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih maju, disusunnya beberapa rencana daerah yang akan mempermudah pelaksanaan pembangunan, dan tentu saja meningkatnya kualitas prasarana jalan.

Organisasi lain yang pernah memberikan bantuan luar negeri adalah Foster Parents Plan Inc. Program ini bersifat social dan bertujuan untuk membantu keluarga-keluarga di Bali yang keadaan social ekonominya sangat lemah dengan menitikberatkan pada bantuan anak-anak dalam keluarga tersebut. Lembaga ini beroperasi dengan dukungan dari orang tua angkat di Australia, Kanada, Belanda, dan Amerika Serikat pada suatu aliran agama, ekonomi maupun politik. Lain halnya dengan bantuan UNICEF, yang dilatarbelakangi oleh

bencana alam gempa bumi tanggal 14 Juli 1976 yang menimpa Kabupaten Tabanan, Buleleng dan Jembrana. Akibat yang ditimbulkan adalah kurangnya penyediaan air bersih.

Bantuan dari CARE lebih ditujukan untuk membangun perumahan yang kurang mampu dan belum memenuhi persyaratan kesehatan, sedangkan sasaran lokasinya adalah tersebar di seluruh kabupaten di Bali terutama pada daerah kritis dan minus. Pembangunan di bidang pertanian secara khusus dibantu dengan keberadaan Bank Pembangunan Asia yang melakukan penelitian pengembangan daerah aliran sungai, peningkatan sarana irigasi, penyediaan air bersih, dan peningkatan kesehatan masyarakat. Manfaat yang diperoleh bagi Bali adalah peningkatan secara langsung produksi tanaman padi.

Jenis bantuan pusat bagi pembangunan daerah yang lainnya adalah Inpres. Bantuan ini memiliki beberapa jenis bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Seperti; Inpres Desa, Inpres sekolah dasar, Inpres kesehatan, inpres penghijauan dan inpres dati I. Selama kurun waktu lima tahun pelaksanaan Repelita III telah dialokasikan dana inpres sebanyak Rp 76,968 milyar. Diantara jenis-jenis inpres yang ada, maka inpres sekolah dasar mendapat alokasi dana yang paling besar yaitu rata-rata 57,18% selama Repelita III. Namun jumlahnya terus mengalami penurunan dengan tingkat penurunan rata-rata 33,37% setiap tahun. Inpres lainnya yaitu Inpres Dati II setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan kenaikan rata-rata 7,72% setiap tahun. Kenaikan jumlah bantuan tersebut sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk masing-masing daerah Tingkat II (Bappeda Tingkat I Bali, 1990 : 24).

Inpres penunjang jalan merupakan program yang sangat penting dalam upaya meningkatkan perekonomian serta mengurangi keterisoliran suatu daerah, sehingga bantuan yang diperoleh setiap tahun meningkat rata-rata 31,41%. Dalam Repelita IV meningkat dengan rata-rata kenaikan 113,58% setiap tahun. Peningkatan ini terjadi karena adanya bantuan luar negeri yang sangat besar Rp 26,013 milyar.

Pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pemerintah Bali sendiri adalah APBD I dan PAD. Proyek-proyek APBD I dilaksanakan sebagai penunjang pelaksanaan proyek-proyek pelita nasional/sektoral di daerah. Perkembangan dana APBD

Tingkat I selama Pelita III dan IV pada umumnya mengalami peningkatan, namun tahun 1985/1986 mengalami penurunan dana sebesar 3,12%. Hal ini disebabkan karena PAD yang dialokasikan kepada APBD Tingkat I bidang pembangunan mengalami penurunan sebesar 15,81%. Selain itu pengalokasian PAD untuk APBD I Bali tahun 1982/1983 mengalami penurunan 48,42%. Walaupun demikian secara total APBD Tingkat I Bali pada tahun tersebut meningkat sebesar 2,89%. Peningkatan dana ini terjadi karena sumber dana Inpres Dati I Bali mengalami peningkatan sebesar 20% tahun 1982/1983 (Bappeda Tingkat I Bali, 1990 : 27).

Sedangkan proyek APBD II dilaksanakan pada masing-masing kabupaten untuk menunjang proyek sektoral dan APBD I yang terdapat di masing-masing kabupaten. Perkembangan dana APBD Tingkat II adalah sesuai dengan kemampuan atau situasi keuangan pada masing-masing kabupaten. Sehingga jika dilihat dari sembilan Dati II yang ada di Bali, kemampuan daerah untuk melaksanakan proyek APBD II sangat berbeda. Tiga Dati II yaitu Denpasar, Badung dan Gianyar memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan Dati II lainnya.

Realisasi pembiayaan pembangunan yang berasal dari sector pemerintah rata-rata mengalami peningkatan 17,03% per tahun yaitu Rp 371,31 milyar tahun anggaran 1994/1995 menjadi Rp 696,47 milyar tahun anggaran 1998/1999. Realisasi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari APBN dan inpres mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena realisasi APBN mengalami penurunan, yang disebabkan adanya penundaan atau penjadwalan kembali proyek-proyek APBN tahun anggaran 1997/1998 akibat dari adanya krisis ekonomi yang dimulai pertengahan tahun 1997. Begitu pula realisasi APBD I tahun anggaran 1998/1999 mengalami penurunan yang disebabkan adanya penundaan proyek-proyek yang bersumber dari PAD karena diberlakukannya UU Nomor 18/1997 tentang retribusi dan pajak daerah (Bappeda Tingkat I Bali, 1998 : 225).

Khusus mengenai peranan PAD, dalam pembiayaan selama satu tahun terakhir yaitu tahun 1997/1998 dan 1998/1999 mengalami penurunan. Namun berbagai usaha hendaknya harus dilakukan seperti; penyuluhan/pembinaan kepada masyarakat, penyempurnaan peraturan-peraturan, mengadakan pemungutan yang lebih aktif dan terpadu, mencari

dan menggali sumber penerimaan yang memungkinkan. Jika dikaitkan dengan peranannya dalam pembiayaan pembangunan, maka pembiayaan rutin hendaknya diupayakan seefisien mungkin sehingga alokasi PAD ke pembiayaan pembangunan lebih besar.

Jika dilihat dari tingkat efektifitas, upaya peningkatan peran PAD selama lima tahun terakhir menunjukkan efektifitas yang tinggi. Tabel 2 menunjukkan selama lima tahun terakhir, pencapaian target PAD berada di atas 100%.

Tabel 2. Tingkat efektifitas PAD Provinsi Bali (Jutaan Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efektifitas
2003	601.045,150	628.794,704	104,62
2004	722.334,455	806.566,457	111,66
2005	906.053,280	1.013.082,502	111,81
2006	1.074.485,989	1.150.934,289	107,11
2007	1.282.579,146	1.368.004,404	106,66

Sumber : Bappeda (2007 : I-33)

Tingginya tingkat efektifitas PAD, ternyata belum menimbulkan perubahan pada alokasi penerimaan di Provinsi Bali. Tabel 3 menunjukkan, kecuali untuk tahun anggaran 1998/1999, semua penerimaan daerah sebagian besar (di atas 50%) dialokasikan untuk belanja langsung.

Tabel 3. Alokasi APBD Provinsi Bali (%)

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
1998/1999	49,97	50,03
1999/2000	62,61	37,39
2000	52,47	47,53
2001	64,33	33,26
2002	61,57	34,52
2003	78,15	21,85
2004	76,05	23,95
2005	68,25	31,75
2006	65,65	34,35
2007	62,65	37,35

Sumber : Bappeda (2007 : I-29)

Analisis Tingkat Ekonomi Anggaran Publik

Alokasi anggaran publik menuntut adanya transparansi yang ditunjukkan oleh adanya sosialisasi kepada publik. Akuntabilitas juga sangat dituntut. Instansi publik atau pemerintah di Provinsi Bali dituntut untuk mempergunakan anggaran publik seefisien mungkin. Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sector publik dapat dilakukan dengan menghitung tingkat ekonomi. Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran pengelu-

aran dan realisasinya, Mahsun (2006: 186). Hasil perhitungan seluruh instansi pemerintah di Provinsi Bali, ditunjukkan dalam tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Ekonomi Instansi Pemerintah di Provinsi Bali, 2007

Instansi Pemerintah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
Dinas Pendidikan	76,34	92,26
Dinas Perpustakaan Daerah	98,68	97,63
Dinas Kesehatan	94,45	82,67
Badan Pelayanan Khusus (RSJ)	95,79	97,32
Badan Pelayanan Khusus (RS Indra Masyarakat)	95,07	83,43
Dinas PU Provinsi Bali	98,06	74,86
Bappeda Provinsi Bali	98,88	88,84
Dinas Perhubungan	88,51	90,94
Bapedalda	93,50	95,60
Badan Kependudukan	96,33	94,83
Dinas kesejahteraan social	96,25	91,14
Dinas Tenaga Kerja	95,43	94,52
Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah	96,58	92,39
BKPMMD Provinsi Bali	99,30	94,91
Dinas Kebudayaan	96,02	97,80
Badan Kesbanglinmas Daerah	157,39	63,82
DPRD Provinsi Bali	97,08	-
Kepala Daerah	95,02	-
Sekretariat Daerah	97,69	87,22
Sekretariat Daerah DPRD	96,91	76,01
Badan Pengawas Daerah	98,82	92,44
Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali	96,82	95,38
Dinas Pendapatan	99,31	94,44
Kantor Polisi Pamong Praja	98,06	98,10
Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	103,64	91,00
Badan Kegewaaian Daerah	90,73	88,89
BPMD	98,53	90,74
Kantor Arsip Daerah	97,31	91,80
BITD	100,95	93,01
Dinas Pertanian	97,73	96,35
Dinas Perkebunan	96,98	94,61
Dinas Peternakan	97,59	81,31
Dinas Kehutanan	97,19	84,15
Dinas Pariwisata	98,32	88,32
Dinas Perikanan dan Kelautan	96,98	85,46
Dinas Perindustrian	95,02	93,96

Sumber : Bappeda Provinsi Bali, 2007

Tabel 4 menunjukkan terdapat tiga instansi pemerintah yang memiliki tingkat ekonomi lebih dari 100 (tidak ekonomis), yaitu Badan Kesbanglinmas Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dan BITD.

Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Anggaran Publik

Partisipasi masyarakat menjadi keharusan dalam perencanaan dan pengawasan anggaran publik. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dengan menyebarkan informasi anggaran public secara terbuka. Media yang paling cepat dan perlu ditingkatkan kualitas keberadaannya adalah penyebaran

informasi anggaran public melalui internet.

Upaya go online bagi pemerintah daerah dimulai secara serius sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No. 03 tanggal 9 Juni 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government oleh presiden kala itu. Departemen komunikasi dan informasi menjadi *leading sector* untuk mewujudkan implementasi proyek besar ini dengan memberikan panduan, pedoman, arahan, standar serta *blue print*. Sebagai pelaksana, di setiap pemerintah daerah terdapat dinas komunikasi dan informasi yang bertugas mengimplementasikannya.

Dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, tercatat 55,2% diantaranya telah memiliki situs resmi yang bisa diakses melalui internet, 33,4% belum memiliki situs dan 11,4% situsnya tidak dapat dibuka. Mengenai tampilan situs resmi pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia, tim Litbang KOMPAS menilai terdapat 20 terbaik yang memperoleh nilai di atas 70. Penilaian didasarkan pada empat aspek utama sesuai panduan depkominfo, yaitu meliputi fungsi, kualitas, tampilan situs, dan inovasi pengelola situs. Penilaian tersebut belum memasukkan tingkat akuntabilitas, terutama berkenaan dengan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang diwakili situs tersebut. Maksud dibuatnya sebuah situs adalah untuk mengkomunikasikan apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh sebuah pemerintahan beserta pertanggungjawaban kepada rakyat yang diwakilinya. Penelusuran terhadap situs-situs pemerintah menghasilkan temuan akuntabilitas public yang masih rendah. Pencarian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, apalagi yang sudah diaudit oleh BPK-RI di situs-situs berakhiran go.id ini hampir mustahil didapat, Andrianto, (2007 : 81)

Simpulan

Alokasi anggaran publik perlu diperhatikan dengan lebih memprioritaskan pada pengeluaran yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Efisiensi dan transparansi perlu diperhatikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Perlu dilakukan partisipasi masyarakat sejak dini, misalnya dengan membentuk kelompok pemuda yang diberikan teknik sederhana mengolah informasi anggaran publik di internet.

Daftar Pustaka

- Anonimus, Bali Membangun, 1983, 1986, 1988,1994, 1998, 2001, 2007. Bappeda Provinsi Bali
- Anonimus, 1998. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Dalam Repelita VI Provinsi Dati I Bali
- Andrianto, Nico. 2007. Good e-Government : Transparansi dan AKuntabilitas Publik Melalui e_Government. Bayumedia Publishing. Malang.
- Barata, Atep Adya dan Trihartanto Bambang. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Berdasarkan UU No.17 tahun 2002 Tentang Keuangan Negara. 2004. PT Elex Media Komputindo Kelompok Kompas-Gramedia, Jakarta.
- Mahsun, Moh. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, 2006. BPFE Yogyakarta.

NI MADE TISNAWATI, menamatkan pendidikan S1(2000) dan S2(2004) di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, jurusan ilmu ekonomi dengan konsentrasi ekonomi pembangunan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan, antara lain; Analisis Pengaruh PAD, Bantuan Sektoral (APBN), Bantuan luar negeri dan sisa anggaran terhadap pembiayaan pembangunan di Provinsi Bali, Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia, Persepsi Remaja Bali terhadap Kehamilan Pranikah, investasi di desa pakraman, KTD dikalangan PUS di Bali. Mantan pegiat pers kampus mahasiswa ini, sejak tahun 2005 menjadi dosen di jurusan ilmu ekonomi FE Unud.
Telp : (081)79766188, (0361) 294172